

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP)
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014**

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015**

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014. LKj ini merupakan bentuk komitmen nyata Badan Pendidikan dan Pelatihan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKj IP adalah wujud pertanggungjawabn pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Tujuan penyusunan LKj IP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam

yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang, 2015

**KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



HERRU SETIADHIE, SH, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19601014 198903 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Organisasi Badan Pendidikan Dan Pelatihan	1
B. Fungsi Strategis Badan Pendidikan Dan Pelatihan	4
C. Permasalahan Utama yang Dihadapi Badan Pendidikan Dan Pelatihan	7
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
Perjanjian Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014	
A. Capaian Kinerja Organisasi Badan Pendidikan Dan Pelatihan	11
B. Realisasi Anggaran	18
BAB IV PENUTUP	
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan	20
B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	20
Lampiran 1	
Lampiran 2	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah	2
Gambar 1.2 Model Sistem Diklat Berbasis Kompetensi	6

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data SDM Badan Pendidikan dan Pelatihan	3
--	----------

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah. Struktur organisasi ini merupakan hasil penataan kembali SOTK sebelumnya (Perda Nomor 1 Tahun 2002).

Badan Diklat merupakan lembaga teknis daerah di bidang pendidikan dan pelatihan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan tugas pokok Badan Diklat sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 79) adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pendidikan dan pelatihan.

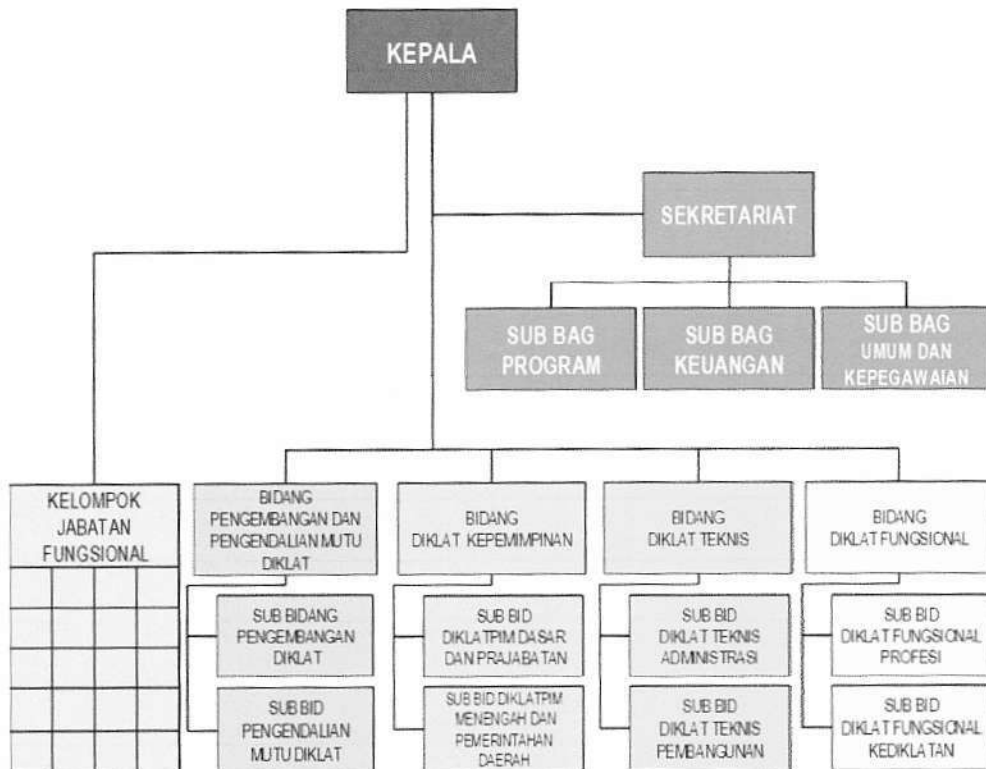
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan pelatihan aparatur;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan dan pelatihan aparatur;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis serta pendidikan dan pelatihan fungsional aparatur di lingkup provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan pelatihan aparatur;
- e. pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah secara jelas digambarkan jenjang-jenjang struktural yang terdiri dari Kepala Badan sebagai unsur pimpinan sampai kepada jenjang yang berada dibawahnya sebagai unsur pelaksana dan kelompok jabatan fungsional. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya pembagian tugas yang dilaksanakan secara menyeluruh.

Gambar 1.1.
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TENGAH
 (Berdasar PERDA Nomor 7 Tahun 2008)



Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dalam gambar 2 tersebut, rincian komposisi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
3. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat
4. Bidang Diklat Kepemimpinan
5. Bidang Diklat Teknis
6. Bidang Diklat Fungsional
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Komposisi jabatan struktural di SKPD Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eselon II, 5 (lima) orang Pejabat eselon III, dan 11 (sebelas) orang Pejabat eselon IV.

Sedangkan untuk jabatan fungsional di Badan Diklat yaitu pejabat fungsional Widyaiswara, sampai dengan kondisi bulan Januari 2014 sejumlah 47 (empat puluh tujuh) orang yang tersebar di 5 lokasi, yaitu di Badan Diklat, BPSDM Soropadan, BPSDM Peternakan, BPTPK Gombong dan Balatkop.

Secara rinci sumber daya manusia Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1.
DATA SUMBER DAYA MANUSIA BADAN DIKLAT PROVINSI JAWA
TENGAH BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

	S3	S2	S1	Diploma	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
STRUKTURAL DAN JFU	-	30	45	1	47	13	14	150
CPNS	-	-	1	-	-	-	-	1
WIDYAISWARA	3	35	8	-	-	-	-	46
NON PNS	-	-	8	4	40	3	2	57
JUMLAH	3	65	62	5	87	16	16	254

B. Fungsi Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan

Sebagai upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya serta lingkungan hidup dalam kerangka NKRI sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 dengan Visi : **“Jawa Tengah Yang Mandiri, Maju Sejahtera dan Lestari”**, telah ditetapkan 6 (enam) Misi yang mencakup tentang kualitas sumber daya manusia dan masyarakat, perekonomian daerah, politik dan **tata kelola pemerintahan**, sumber daya alam, sarana prasarana wilayah dan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah NKRI.

Target dalam RPJPD tersebut menjadi acuan perencanaan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta rencana jangka pendek dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Tahun 2014 merupakan tahap ke III RPJPD yang dipimpin oleh Bapak Ganjar Pranowo, SH. sebagai Gubernur Jawa Tengah, dan telah ditetapkan Visi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 yaitu :

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI

“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
3. **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”;**
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;

5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

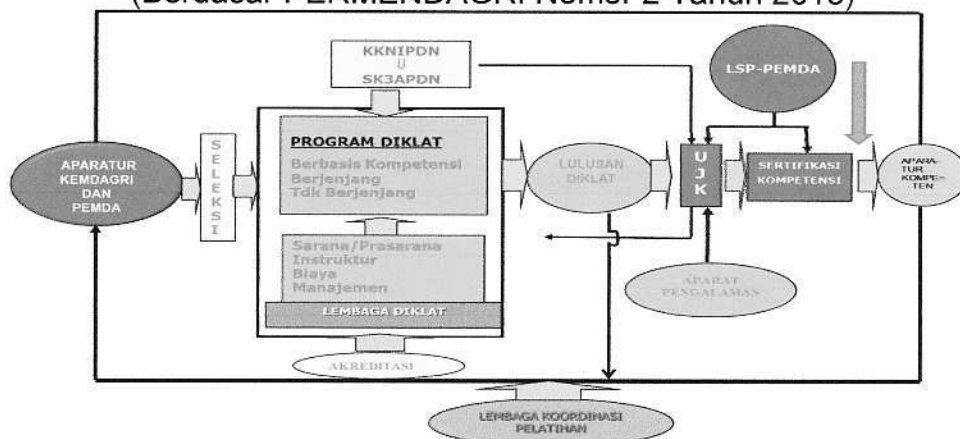
Sesuai dengan misi ke-3 RPJPD Jawa Tengah 2005 - 2025 yaitu : Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh **kompetensi dan profesionalitas aparatur**, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta pengembangan jejaring, yang diimplementasikan dalam misi ke-3 Rencana Jangka Menengah (RPJMD) Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018, menjadi landasan atau tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima, serta menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki tugas dalam pengelolaan pelayanan publik, motor penggerak pembangunan, menerjemahkan berbagai keputusan politik strategis ke dalam berbagai kebijakan publik yang operasional, dan menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda. Birokrasi mencakup kelembagaan, sistem manajemen dan **sumberdaya aparatur**. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan perlu adanya: pembenahan/peningkatan sistem kelembagaan dan manajemen, serta **peningkatan kinerja instansi dan sumber daya aparturnya**. Secara spesifik untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme sumber daya aparatur maka dilakukan berbagai penyelenggaraan **pendidikan dan pelatihan**, pembenahan manajemen kepegawaian, serta penerapan *reward* dan *punishment*.

Untuk mewujudkan misi ke-3 RPJMD Jawa Tengah 2013 - 2018 (Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”) tersebut Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013 - 2018. Renstra memuat visi, misi, tujuan, program, dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2013 - 2018 berikut target *output* dan *outcome* yang akan dicapai.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 telah mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan lahirnya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Secara operasional sudah terlebih dahulu diterbitkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi dimana faktor kunci pelatihan berada pada sertifikasi kompetensi untuk menetapkan kebutuhan sekaligus menentukan tingkat kualitas lembaga diklat dan program diklat. Siklus pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana digambarkan pada bagan di bawah ini.

Gambar 1.2.
MODEL SISTEM DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI
 (Berdasar PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2013)



Mandat baru tersebut ditindaklanjuti dengan menerapkan strategi reposisi (penguatan) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dengan paradigma baru dengan menunjukkan kinerja yang nyata dalam

meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan. Strategi penguatan Badan Pendidikan dan Pelatihan kedepan adalah :

1. Meningkatkan kualitas *input* pendidikan dan pelatihan.

Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas program melalui identifikasi/analisa kebutuhan diklat berbasis kompetensi, artinya diklat yang akan dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan kompetensi aparatur di Jawa Tengah. Selain ini seleksi terhadap calon peserta diklat sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan, sehingga calon peserta yang mendaftar benar-benar aparatur yang membutuhkan diklat tersebut.

2. Meningkatkan kualitas proses penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Kualitas input yang bagus harus diimbangi dengan proses yang bagus pula. Kualitas proses ditindaklanjuti dengan peningkatan program, kebijakan teknis, sarana prasarana, tenaga pengajar, biaya dan manajemen yang baik. Untuk mengukur tingkat keberhasilan proses tersebut dilaksanakan berbagai evaluasi yang dapat mengukur tingkatan kompetensi peserta sebelum dan sesudah mengikuti pendidikan dan pelatihan.

3. Meningkatkan kualitas *outcomes* penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Adanya penegasan mengenai implementasi efektif pembelajaran dan adanya bukti bahwa perubahan-perubahan implementasi adalah hasil dari pendidikan dan pelatihan dengan mengevaluasi tindak lanjut jangka menengah dan jangka panjang pendidikan dan pelatihan.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Badan Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan utama Badan Pendidikan dan Pelatihan dalam upaya meningkatkan kompetensi aparatur adalah :

- 1) Belum semua jabatan PNS disusun standar kompetensinya sebagai acuan penyelenggaraan sistem diklat berbasis kompetensi.

2) Belum adanya standar kompetensi menyebabkan penyelenggaran diklat belum sepenuhnya berbasis kompetensi.

BAB II PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2014 telah melakukan Perjanjian

Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan tersebut, maka Badan Pendidikan dan Pelatihan telah melaksanakan 2 (dua) program, 12 kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 64.550.552.000,-.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Tahun 2014, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1 .

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Hingga akhir tahun 2014, Badan Pendidikan Dan Pelatihan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013 - 2018, setidaknya terdapat 5 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

- a. **Sasaran 1** : Terwujudnya Peningkatan Kesekretariatan, Pengendalian Mutu Diklat, Pengkajian dan Pengembangan Diklat, Profesionalisme Widyaiswara dan kelancaran penyajian informasi

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2014		Capaian Th. 2014	Capaian Th 2013	Capaian Th 2012
		Target Kinerja	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terwujudnya Peningkatan Kesekretariatan, Pengendalian Mutu Diklat, Pengkajian dan Pengembangan Diklat, Profesionalisme Widyaiswara dan kelancaran penyajian informasi	1. Jumlah kegiatan Peningkatan Bidang Kesekretariatan	3 Keg	3 Keg	100	100	100
	2. Jumlah dokumen pengembangan dan pengendalian mutu diklat	3 Dok	3 Dok	100	100	100
	3. Jumlah dokumen pengkajian dan pengembangan diklat	3 Dok	3 Dok	100	100	100
	4. Jumlah Dokumen Reformasi Kediklatan	4 Dok	4 Dok	100	100	100
	5. Jumlah Pejabat Fungsional Widyaiswara madya melaksanakan orasi ilmiah dan temu ilmiah	4 org	4 org	100	100	100
	6. Jumlah warta diklat yg terbit	5 Edisi	5 Edisi	100	100	100
	7. Jumlah jurnal kediklatan yg terbit	3 Edisi	3 Edisi	100	100	100
	8. Jumlah leaflet yang dicetak	100 Eks	100 Eks	100	100	100
	9. Jumlah kalender yang dicetak	450 Eks	450 Eks	100	100	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran-1**, dari 9 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa capaian kinerja dari indikator kinerja dicapai telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Mengacu pada hasil pengukuran di atas terlihat bahwa,:

1. Jumlah kegiatan Peningkatan Bidang Kesekretariatan memenuhi target yaitu 3 kegiatan (100%);
2. Jumlah dokumen pengembangan dan pengendalian mutu diklat memenuhi target yaitu 6 kurikulum yang disusun (100%), silabi dan modul yang disempurnakan (100 %), dan 5 SKPD yang di AKD (100%);
3. Jumlah dokumen pengkajian dan pengembangan diklat memenuhi target (100%) yaitu 1 dokumen Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat di Jawa Tengah, 1 dokumen Evaluasi pra Diklat serta Pemantauan, 1 dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Diklat di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, dan 1 dokumen Evaluasi Pasca Diklat bagi Alumni Diklat badan Diklat Prov. Jateng;
4. Jumlah Dokumen Reformasi Kediklatan memenuhi target (100 %) yaitu 1 dokumen pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan diklat dilingkungan Pemprov dan Kab/Kota se-Jawa Tengah, 1 dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, 1 dokumen Standard Operational Procedure (SOP) Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, dan 1 dokumen Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kapasitas Badan Diklat Prov. Jateng;
5. Jumlah Pejabat Fungsional Widyaiswara madya melaksanakan orasi ilmiah dan temu ilmiah memenuhi target yaitu 4 orang Widyaiswara Madya (100 %)
6. Jumlah warta diklat yang terbit memenuhi target yaitu 5 edisi (100%);
7. Jumlah jurnal kediklatan yang terbit memenuhi target yaitu 3 edisi (100%);
8. Jumlah leaflet yang dicetak memenuhi target yaitu 100 eksemplar (100%);
9. Jumlah kalender yang dicetak memnuhi target yaitu 450 eksemplar (100%).

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian **sasaran -1**, diantaranya adalah :

1. *Tidak tentunya jadwal penyelesaian modul;*
2. *Belum tersusunnya standarisasi kompetensi jabatan sebagai dasar penyusunan modul dan pelaksanaan AKD;*
3. *Bervariasinya faktor pengaruh pada setiap jenis diklat, sehingga diperlukan analisis yang tepat untuk menghasilkan petunjuk teknis yang sesuai,*
4. *Masih kurangnya pemahaman terhadap alur atau prosedur kerja sehingga dokumen SOP yang telah dihasilkan perlu dikaji ulang dan dievaluasi;*
5. *Kurangnya waktu bagi Widyaiswara untuk menyusun bahan dalam Temu Ilmiah.*

Pencapaian kinerja **sasaran-1** Tahun 2014 tergolong stabil apabila dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2013. Hal tersebut disebabkan antara lain :

1. *Adanya kerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam penyusunan kurikulum diklat,*
2. *Didukung SDM yang kompeten dalam penyusunan kurikulum, silabi dan modul;*
3. *Dukungan Lembaga untuk menghadirkan narasumber yang kompeten;*

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. *Monitoring terhadap jadwal penyusunan modul sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan tepat waktu;*
2. *Implementasi konsep penyusunan kurikulum diklat yang berbasis kompetensi (competency based curriculum);*
3. *Mendasarkan petunjuk teknis sesuai Siklus Diklat yang meliputi Analisis Kebutuhan Diklat, Penetapan Tujuan Diklat, Pengembangan Desain Pembelajaran, Pelaksanaan Diklat dan Evaluasi Diklat.*

4. *Melakukan evaluasi terhadap SOP AP Badan Diklat yang telah dihasilkan, untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh SDM Badan Diklat;*
5. *Memberikan kesempatan dan dukungan biaya untuk melakukan Temu Ilmiah.*

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. *Monitoring jadwal penyusunan modul berikut mekanisme reward untuk memotivasi SDM penyusun modul,*
2. *Merumuskan dan menyusun kurikulum berbasis kompetensi (competency based curriculum);*
3. *Melakukan evaluasi pra pelaksanaan Diklat agar sesuai Siklus Diklat yang meliputi Analisis Kebutuhan Diklat, Penetapan Tujuan Diklat, Pengembangan Desain Pembelajaran, Pelaksanaan Diklat dan Evaluasi Diklat;*
4. *Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi sebagai narasumber penyusunan Karya Tulis Ilmiah.*

Adapun realisasi capaian target Renstra 2008-2013 sampai dengan tahun 2012, pada sasaran-1 adalah :

1. Indikator pertama telah mencapai target 23 %, berarti capaian sasaran-**sesuai** dengan target yang telah ditetapkan.
2. Indikator kedua telah mencapai target 18 %, berarti capaian sasaran-**perlu percepatan** agar pada akhir masa Renstra target bisa tercapai.
3. Indikator ketiga telah mencapai target 23 %, berarti capaian sasaran-**sesuai** dengan target yang telah ditetapkan.
4. Indikator keempat telah mencapai target 22 %, berarti capaian sasaran-**sesuai** dengan target yang telah ditetapkan.
5. Indikator kelima telah mencapai target 20 %, berarti capaian sasaran-**sesuai** dengan target yang telah ditetapkan.
6. Indikator keenam telah mencapai target 20 %, berarti capaian sasaran-**sesuai** dengan target yang telah ditetapkan.

7. Indikator ketujuh telah mencapai target 20 %, berarti capaian sasaran-**sesuai** dengan target yang telah ditetapkan.
8. Indikator ketujuh telah mencapai target 20 %, berarti capaian sasaran-**sesuai** dengan target yang telah ditetapkan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.2, adalah sebesar Rp 2.346.078.979,- atau 72,15 % dari total pagu sebesar Rp. 3.252.014.000,-. Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 27,85 % dari pagu yang ditentukan

a. Sasaran 2 : Terwujudnya Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2014		% Capaian Th. 2014	% Capaian Th 2013	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2018)
		Target Kinerja	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terwujudnya Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi	1. Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	1.943 org	1.874 org	95,42	100	100
	2. Jumlah ASN yang mengikuti diklat fungsional	895 org	895 org	100	100	100
	3. Jumlah ASN yang mengikuti diklat kepemimpinan	950 org	917 org	96,53	98,36	99,41
	4. Jumlah ASN yang mengikuti diklat pemerintah daerah	60 org	58 org	96,67	100	100
	5. Jumlah ASN yang mengikuti diklat prajabatan	480 org	460 org	95,83	94,15	99,54

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran-2**, dari indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa capaian kinerja dari indikator kinerja dicapai belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Mengacu pada hasil pengukuran di atas terlihat bahwa, Jumlah kelulusan Diklat Kepemimpinan sebanyak 917 orang (96,53%); jumlah kelulusan peserta Diklat Teknis 1.874 orang (95,42%) dan jumlah kelulusan peserta Diklat Prajabatan 460 orang (95,83%).

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian **sasaran-2**, adalah satu angkatan Diklat Kepemimpinan Tk. IV tidak dapat dilaksanakan dikarenakan gagal dalam lelang pengadaan barang/jasa, untuk diklat teknis disebabkan karena pada saat pemanggilan peserta calon peserta tidak dapat mengikuti karena sedang melaksanakan tugas pada instansinya. Peserta diklat prajabatan tidak bisa memenuhi target dikarenakan penetapan Nomor Induk Pegawai yang mengalami penundaan.

Pencapaian kinerja **sasaran-2** Tahun 2014 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2013. Terjadinya penurunan tersebut disebabkan antara lain :

1. Belum optimalnya manajemen penyelenggaraan diklat sehingga ada satu angkatan Diklat Kepemimpinan Tk. IV yang tidak dilaksanakan;
2. Belum optimalnya pemantauan terhadap perkembangan jumlah CPNS sehingga tidak dapat mengantisipasi perubahan jumlah CPNS tersebut;
3. Pilihan prioritas tugas kedinasan yang lebih penting dibanding untuk mengikuti diklat kepemimpinan.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. *Melaksanakan prinsip manajemen dengan sebaik-baiknya melalui siklus PDCA (plan, do, check, act) sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik;*
2. *Penjaringan peserta dilakukan lebih awal sehingga kekurangan calon peserta karena kesibukan bisa teratasi;*
3. *Memantau perkembangan perubahan pejabat Struktural/CPNS di lingkungan pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Jawa Tengah.*

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

Penyebaran formulir kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan BKD pada pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah untuk pendataan pejabatan struktural/CPNS yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan/Diklat Prajabatan.

Untuk **realisasi kinerja sampai dengan tahun 2014 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah** yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan telah tercapai 22%, ini berarti telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 20%.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2, adalah sebesar Rp 34.523.368.837,- atau 88,87 % dari total pagu sebesar Rp. 41.375.178.000,-. Dengan adanya satu kegiatan Diklat Kepemimpinan Tk. IV yang tidak dilaksanakan dimana anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 482.633.000, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 15,57 % dari pagu yang ditentukan .

Keberhasilan pencapaian sasaran 2 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat
2. Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Diklat
3. Kegiatan Reformasi Kediklatan
4. Kegiatan Pengembangan Standarisasi dan Profesionalisme Widyaiswara

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2014, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 64.550.552.000,- bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp 8.521.951.000,-.
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 50.065.983.000,-
3. Belanja Modal sebesar Rp 5.962.618.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Terwujudnya Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi	Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah	41.458.178.000	34.605.253.535	83,47
2. Terwujudnya Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	900.000.000	861.917.900	95,76
3. Terwujudnya rumusan kebijakan teknis bidang kediklatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	1.020.000.000	1.010.553.470	99,07
4. Terwujudnya kualitas dan profesionalitas SDM kediklatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	225.130.000	200.100.094	88,88
5. Terwujudnya layanan administrasi serta unit layanan informasi dan promosi tentang penyelenggaraan diklat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	381.884.000	360.222.110	94,32

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2014, apabila dibandingkan Tahun 2013 maka terjadi penurunan sebesar 4,57 .%, Tahun 2014 sebesar 88,65 %, Tahun 2013 sebesar 93,22 %.

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah Badan Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di Bidang pendidikan dan pelatihan aparatur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan..

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa **Badan Pendidikan dan Pelatihan** dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Baik**. Hal tersebut didukung dengan data hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (98,45%), dengan rincian prosentase per sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 : Terwujudnya Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi sebesar 96,89 %.
- Sasaran 2 : Terwujudnya Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat sebesar 100 %.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan di masa mendatang antara lain :

1. Monitoring jadwal penyusunan modul berikut mekanisme reward untuk memotivasi SDM penyusun modul.
2. Merumuskan dan menyusun kurikulum berbasis kompetensi (competency based curriculum).
3. Melakukan evaluasi pra pelaksanaan Diklat agar sesuai Siklus Diklat yang meliputi Analisis Kebutuhan Diklat, Penetapan Tujuan Diklat, Pengembangan Desain Pembelajaran, Pelaksanaan Diklat dan Evaluasi Diklat;
4. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi sebagai narasumber penyusunan Karya Tulis Ilmiah.
5. Penyebaran formulir kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan BKD pada pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah untuk pendataan pejabat struktural/CPNS yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan/diklat prajabatan.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2014 Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang

Sekian dan terima kasih.

Semarang, 2015

**KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



HERRU SETIADHIE, SH, M.Si. ^A

Pembina Utama Madya

NIP. 19601014 198903 1 002

Lampiran 1

Pengukuran Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya Peningkatan Kesekretariatan, Pengendalian Mutu Diklat, Pengkajian dan Pengembangan Diklat, Profesionalisme Widyaiswara dan kelancaran penyajian informasi	1. Jumlah kegiatan Peningkatan Bidang Kesekretariatan	100 %
	2. Jumlah dokumen pengembangan dan pengendalian mutu diklat	100 %
	3. Jumlah dokumen pengkajian dan pengembangan diklat	100 %
	4. Jumlah Dokumen Reformasi Kediklatan	100 %
	5. Jumlah Pejabat Fungsional Widyaiswara madya melaksanakan orasi ilmiah dan temu ilmiah	100 %
	6. Jumlah warta diklat yg terbit	100 %
	7. Jumlah jurnal kediklatan yg terbit	100 %
	8. Jumlah leaflet yang dicetak	100 %
	9. Jumlah kalender yang dicetak	100 %
Terwujudnya Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi	1. Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	95,42 %
	2. Jumlah ASN yang mengikuti diklat fungsional	100 %
	3. Jumlah ASN yang mengikuti diklat kepemimpinan	96,53 %
	4. Jumlah ASN yang mengikuti diklat pemerintah daerah	96,67 %
	5. Jumlah ASN yang mengikuti diklat prajabatan	95,83 %

Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)
Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah	Rp. 41.458.178.000,-	Sumber Anggaran 100 % dari APBD
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Rp. 3.252.014.000	Sumber Anggaran 100 % dari APBD

Lampiran 2

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2014

No	Jenis Blnj	Program	Kgt	Jml Anggaran	Realisasi	Selisih	%
A	BOP	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kegiatan Peningkatan Bidang Kesekretariatan	225.000.000	199.501.875	25.498.125	88,67
			Kegiatan Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat	900.000.000	861.917.900	38.082.100	95,77
			Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Diklat	1.020.000.000	1.010.553.470	9.446.530	99,07
			Kegiatan Reformasi Kediklatan	500.000.000	489.509.640	10.490.360	97,9
			Kegiatan Pengembangan Standarisasi dan Profesionalisme Widyaiswara	225.130.000	200.100.094	25.029.906	88,88
			Kegiatan Media Informasi Diklat	381.884.000	360.222.110	21.661.890	94,33
		2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Kegiatan Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah	300.000.000	277.215.291	22.784.709	92,41
		3. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah	Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	11.266.870.000	11.081.686.045	185.183.955	98,36
			Kegiatan Pendidikan Dan pelatihan Aparatur Fungsional	7.000.000.000	6.783.482.659	216.517.341	96,91
			Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan	20.457.148.000	14.242.236.588	6.214.911.412	69,62
			Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah	415.000.000	364.076.000	50.924.000	87,73

			Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	2.236.160.000	2.051.222.400	184.937.600	91,73
			Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan Pola Kemitraan dengan Pem. Kab./Kota se Jateng	83.000.000	82.549.843	450.157	99,46
Jumlah A dan rata-rata % A				45.010.192.000	38.004.011.415	7.006.180.585	84,43
B	BAU	4.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	8.975.640	24.360	99,73
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.299.720.000	1.276.866.895	22.853.105	98,24
			Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	156.000.000	137.105.805	18.894.195	87,89
			Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	1.035.500.000	1.034.400.000	1.100.000	99,89
			Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	120.000.000	119.932.700	67.300	99,94
			Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	150.000.000	149.954.400	45.600	99,97
			Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	125.000.000	124.990.500	9.500	99,99
			Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	220.088.000	215.378.000	4.710.000	97,86
			Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.000.000	27.802.000	198.000	99,29
			Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	157.610.000	157.305.000	305.000	99,81

			Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	450.000.000	449.808.052	191.948	99,96
			Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	2.298.627.000	2.258.870.500	39.756.500	98,27
		5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	896.500.000	869.228.000	27.272.000	96,96
			Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah	2.500.000.000	2.402.663.600	97.336.400	96,11
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4.885.000.000	4.884.548.100	451.900	99,99
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	436.450.000	422.463.734	13.986.266	96,8
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	500.000.000	499.521.200	478.800	99,9
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	175.000.000	174.730.150	269.850	99,85
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	305.600.000	305.228.850	371.150	99,88
			Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan	15.000.000	15.000.000	-	100
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan	354.972.000	354.450.000	522.000	99,85

			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	2.556.118.000	2.480.721.800	75.396.200	97,05
		6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	196.800.000	187.142.000	9.658.000	95,09
		7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	669.375.000	664.185.301	5.189.699	99,22
Jumlah B dan rata-rata % B				19.540.360.000	19.221.272.227	319.087.773	98,37
Jumlah (A + B) dan rata-rata % (A+B)				64.550.552.000	57.225.283.642	7.325.268.358	88,65